

## **BABI PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kualitas suatu organisasi sangat bergantung pada mutu sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusia dapat menentukan kualitas organisasi dalam keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Setiap organisasi harus mempersiapkan program yang berisi kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM agar organisasi dapat bertahan dan berkembang sesuai dengan lingkungan organisasi. Untuk mencapai produktivitas yang maksimum, organisasi harus menjamin dipilihnya tenaga kerja yang tepat dengan pekerjaan serta kondisi yang memungkinkan mereka bekerja secara optimal.

Peningkatan kualitas pegawai dapat menjamin keberhasilan tujuan organisasi. Bersaing dan berkembang, dapat dilakukan melalui pelaksanaan diklat (pendidikan dan pelatihan) bagi pegawai secara menyeluruh dalam suatu organisasi dari pegawai jajaran kepemimpinan sampai pada pegawai tingkat operasional, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000, yang antara lain menyatakan: "bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan pelatihan jabatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai negeri sipil secara menyeluruh".

Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai muncul dengan adanya berbagai permasalahan yang dialami organisasi seperti pelayanan yang kurang memuaskan. Meskipun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawain telah mengamanatkan terwujudnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, namun demikian kenyataannya pegawai negeri sipil belum mampu memenuhi harapan tersebut.

Pendidikan dan pelatihan sebagai suatu proses pembelajaran dalam organisasi yang mengarah pada perubahan sikap dan perilaku pegawai untuk memenuhi harapan kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik internal maupun eksternal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, disebutkan bahwa tujuan pendidikan dan pelatihan antara lain, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melakukan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS, sesuai dengan kebutuhan instansi, memantapkan sikap dan semangat pengabdian, yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir. Hal tersebut senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai agar lebih meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti diklat.

Kesenjangan yang ada antara kompetensi yang dimiliki sumber daya aparatur dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam suatu jabatan tertentu merupakan hal yang akan menjadi penghambat terhadap keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Sumber daya aparatur tidak akan bisa bersaing jika tidak dilakukan usaha dalam pembekalan

keahlian, keterampilan maupun kompetensi yang memadai terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pendidikan dan pelatihan pegawai tidak akan berjalan efektif tanpa adanya tekad dari pegawai yang bersangkutan. Kebijakan pendidikan dan pelatihan umumnya memberikan kesempatan tetapi tidak memaksa para pegawai, sebab kebijakan yang sehat menghindari pemaksaan. Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan selalu dipengaruhi oleh keinginan dari dalam diri pegawai itu sendiri. Sistem manajemen diklat dikelola dalam lingkup pendidikan dan pelatihan agar dapat memberikan pengaruh positif dalam lingkungan organisasi.

Pendidikan dan pelatihan yang terencana secara tepat dan teratur akan dapat meningkatkan kemampuan dan keteampilan kerja yang sekaligus mengarah kepada peningkatan produktivitas kerja dalam istilah lain dapat dikatakan bahwa tingkat penghasilan seseorang meningkat dengan bertambahnya tingkatan pendidikan dan pelatihan (Tjiptoherijanto,1989).

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, profesional dan sejahtera berkewajiban untuk mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, tentang Diklat Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah dengan memfokuskan pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan tugas menyusun kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meningkatkan produktivitas dan efektivitas Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo telah mengupayakan kerjasama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pelatihan, juga meningkatkan tekad mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo mengupayakan manajemen pendidikan dan pelatihan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan agar dapat memberikan pengaruh positif dalam lingkungan organisasi, serta lancarnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan sehingga organisasi dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh.

Melalui pelaksanaan diklat, pegawai dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang nantinya dapat sebagai modal untuknya dalam bekerja sehingga mampu meningkatkan kinerjanya dalam rangka pencapaian tujuan maupun pengembangan organisasi. Untuk itu, maka organisasi harus melaksanakan diklat yang efektif dalam rangka memenuhi kualitas pegawai. Namun, berdasarkan observasi awal, keterbatasan anggaran dan keterbatasan kompetensi penyelenggara pendidikan dan pelatihan di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Gorontalo sehingga pelaksanaan manajemen diklat kurang optimal.

Dalam pencapaian sasaran pendidikan dan pelatihan, diperlukan rancangan, implementasi maupun evaluasi yang tepat dan efektif dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pelatihan akan menciptakan suatu lingkungan dimana para pegawai dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan maupun perilaku spesifik yang berhubungan dengan bidang pekerjaan

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Pelatihan biasanya terfokus pada penyediaan keahlian khusus bagi para pegawai atau membantu mereka membenahi kelemahan kinerja mereka "(Simamora, 2006:272).

Dalam rangka peningkatan efektifitas diklat sebagai instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu diupayakan dilakukan pembenahan terhadap manajemen pendidikan dan pelatihan dengan demikian, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo akan mampu menjadi daya ungkit (*lverage*) yang paling kuat dalam rangka mewujudkan sosok Pegawai Negeri Sipil Provinsi Gorontalo yang kompeten dan professional menuju birokrasi yang berkualitas dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Efektivitas Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo ".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan program pendidikan dan pelatihan di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perencanaan program pendidikan dan pelatihan di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo.
2. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo.
3. Evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diupayakan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo khususnya BKD-Diklat diharapkan menjadi bahan masukan terkait diklat PNS dilingkungan Kabupaten Gorontalo demi kemajuan daerah.
2. Bagi peserta Diklat dapat memberikan pengetahuan terkait dengan pentingnya mengikuti pelatihan, juga dapat memberikan motivasi untuk terus meningkatkan pengetahuan, kemampuan maupun keterampilan peserta Diklat.
3. Bagi Peneliti sebagai pengetahuan dalam memperkaya wawasan dan kajian tentang manajemen diklat, serta peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa lain yang akan meneliti terkait manajemen pendidikan dan pelatihan.